

PENINGKATAN KEPROFESIONALAN GURU OLEH KEPALA SEKOLAH MELALUI PENELITIAN TINDAKAN SEKOLAH

Ali Imron

Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UM
Email: kangalinet@yahoo.co.id

Abstrak: Guru profesional mempunyai posisi strategis dalam peningkatan mutu pendidikan, karena ia menjadi ujung tombak pelaksanaan pembelajaran yang bermutu. Oleh karena itu, profesionalitas guru perlu ditingkatkan secara berkelanjutan, terutama dalam hal membelajarkan siswanya. Sebagai manajer dan supervisor, kepala sekolah mempunyai TUPOKSI yang terkait dengan pemberdayaan sumber daya sekolah, termasuk guru, beserta dengan pembinaannya secara berkelanjutan. Melalui PTS, kepala sekolah dapat melakukan TUPOKSI sebagai manajer dan supervisor dengan cara yang lebih terencana, metodologis, sistematis dan akuntabel. Kinerja guru profesional dalam membelajarkan dapat juga ditingkatkan oleh kepala sekolah melalui PTS

Kata kunci: guru profesional, kepala sekolah, pengembangan keprofesionalan berkelanjutan,

PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari tenaga kependidikan, kepala sekolah mempunyai posisi strategis. Selain sebagai manajer, kepala sekolah juga menjadi supervisor. Sebagai manajer, kepala sekolahlah yang bertanggungjawab dalam mendayagunakan semua sumber daya sekolah untuk mencapai tujuan, lebih-lebih sumber daya pendidik/guru. Sebagai supervisor, kepala sekolahlah yang bertanggungjawab dalam meningkatkan dan menentukan kualitas pembelajaran guru. Oleh karena itu, kepala sekolah diharapkan dapat memerankan posisi strategisnya guna meningkatkan pendidikan melalui aktivitas peningkatan mengajar guru.

Agar peningkatan kemampuan mengajar guru tersebut dapat diopmalkan, maka salah satu cara yang hendaknya dilakukan secara sistematis adalah melakukan penelitian tindakan sekolah (PTS). PTS adalah salah satu karya tulis untuk kepala sekolah, disamping jenis karya tulis lain yang dapat dilakukan. Tetapi, PTS termasuk salah satu karya tulis kepala sekolah yang terkait secara langsung dengan tugas utama kepala sekolah, ialah sebagai manajer dan supervisor pendidikan di sekolah.

PEMBAHASAN

PTS dan Kinerja Mengajar Guru

Selain sebagai manajer, kepala sekolah juga berperan sebagai supervisor. Baik pekerjaan manajerial maupun supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah, selalu ada persoalan yang dihadapi. Persoalan tersebut, sedikit ataupun banyak, pasti akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuannya. Oleh karena itu, alternatif pemecahan masalah haruslah digali, guna memecahkan persoalan tersebut. Mengingat ruang pelaksanaan aktivitas manajerial dan supervisi berada di satu sekolah, maka proses-proses menemukan persoalan sekolah, merencanakan alternatif tindakan, melakukan tindakan dan mengamati hasil tindakan serta refleksinya ini akan lebih baik kalau dilakukan oleh kepala sekolah. Proses-proses pemecahan masalah praktis yang disistematisasi melalui riset tindakan ini kemudian dikenal dengan Penelitian Tindakan Sekolah (PTS).

Ada sejumlah alasan mengapa PTS harus dilakukan. *Pertama*, alasan filosofis, ialah seorang peneliti baru dipandang bertanggungjawab terhadap ilmunya, jika ketika ia mengetahui persoalan, tidak sekedar menjelaskan persoalan saja. Seorang peneliti tidak selayaknya hanya mampu menjelaskan suatu fenomena tanpa ia terlibat dalam memecahkan persoalan dari fenomena yang ia terangkan. Mengetahui saja, atau dapat menjelaskan saja tentang suatu fenomena, sangat kecil kontribusinya dibandingkan dengan melakukan tindakan konkret atas persoalan dan fenomena yang ia jelaskan. Karena itu, perspektif kritis "menuduh" peneliti yang hanya mampu menjelaskan fenomena, tanpa mampu berbuat untuk memecahkan persoalan sebagai peneliti yang tidak bertanggungjawab.

Kedua, dengan Penelitian Tindakan Sekolah, seorang peneliti (yang juga seorang praktisi), akan merefleksikan persoalan terkait apa yang menjadi tugasnya sehari-hari. Katakanlah seorang kepala sekolah sedang melakukan tindakan-tindakan supervisi akademik di sekolah yang dipimpinnya, ia pertama kali merasakan adanya masalah akademik yang harus ia pecahkan. Karena itu, ia mencoba merumuskan masalah-masalah yang ia hadapi dan dihadapi oleh tenaga kependidikan di sekolahnya. Ia tidak berhenti merumuskan masalah saja, dan hanya menjawab dengan cara menerangkan masalah dan fenomena sebagaimana pada penelitian non tindakan. Atas berbagai masalah yang ia hadapi, ia kemudian merumuskan alternatif pemecahan dalam bentuk rencana tindakan.

Ketiga, agar rencana tindakan tersebut tidak sekedar mandeg sebagai rencana, kepala sekolah melakukan tindakan berdasarkan rencana tindakan yang ia buat. Selanjutnya, ia mengobservasi hasil tindakan yang dilakukan. Dari hasil observasi ini ia akan melihat adanya peningkatan pelaksanaan supervisi. Dari hasil observasi ini, ia bisa melakukan refleksi tentang rencana tindakan berikutnya, yang akan dilakukan pada tahap atau siklus berikutnya. Pada akhirnya, ia akan mampu memecahkan masalah-masalah manajerial dan akademik secara bertahap. Dengan demikian, sebagai seorang peneliti, kepala sekolah tersebut tidak hanya menjelaskan masalah, melainkan juga terlibat dalam memecahkan masalah.

Akar Tradisi PTS

Kritik yang kerap dikedepankan oleh peneliti atau ilmuwan sosial kritis terhadap pendekatan positivistik adalah bahwa mereka hanya berkuat pada persoalan verifikasi empiris atas berbagai teori yang sudah ditemukan. Verifikasi itu mereka lakukan secara berulang, sehingga dunia mereka lebih banyak melakukan sesuatu yang berulang-ulang. Dari teori yang sudah ada, peneliti kuantitatif yang berakar pada positivistik, umumnya membuah model konseptual dan teori, kemudian merumuskan hipotesis dan menguji hipotesis. Ketika hipotesis yang diuji secara empirik ditemukan diterima, maka "langgeng" lah teori itu. Dan, ketika hipotesis tersebut ditolak, maka direvisilah teori tersebut. Dari hasil temuan tersebut, peneliti kuantitatif yang berbasis pada tradisi positivistik umumnya hanya bisa memberikan rekomendasi, baik rekomendasi yang terkait verifikasi teori maupun yang terkait dengan perbaikan praksis. Peneliti kuantitatif tidak terlibat dalam mengaplikasikan rekomendasinya, karena rekomendasi yang diberikan bukanlah ia lakukan, melainkan ditujukan kepada pihak lain. Dengan perkataan lain, di tingkat praksis ini, peneliti kuantitatif "lari dari tanggungjawab" sebagai pelaksana rekomendasi.

Kritik yang dikedepankan oleh peneliti kritis terhadap peneliti kualitatif yang berakar pada tradisi hermeneutik juga tertuju pada perkara tak menyatunya antara riset yang mereka lakukan dengan tindakan yang mereka ambil. Para peneliti kualitatif, setelah bergulat di lapangan, lazimnya hanya menyimpulkan, baik dalam bentuk hipotesis kerja maupun dalam bentuk teori substantif. Dari hipotesis kerja dan teori substantif, umumnya mereka merekomendasikan agar apa yang sudah mereka temukan, diverifikasi lebih lanjut agar menjadi teori formal. Bahkan karena sifat risetnya yang studi kasus, studi multi kasus, studi multi situs, ia sendiri tidak dapat menggeneralisasi hasil risetnya untuk populasi yang lebih luas. Akibatnya, rekomendasi yang ia berikan bersifat terbatas, hanya terbatas pada konteks penelitiannya. Rekomendasi yang ia berikan mungkin bagus, tetapi ia sendiri tidak pernah terlibat dalam implementasi rekomendasi. Ia juga lari dari tanggungjawab sosialnya, ketika rekomendasi tersebut harus diaplikasikan.

Oleh karena itu, baik riset kuantitatif maupun riset kualitatif, sama-sama "lari dari tanggungjawab" untuk memecahkan masalah lapangan, karena dua pendekatan riset ini sama-sama membedakan antara wilayah teoritik dan wilayah praktis. Dunia teori dan dunia praktik telah didikhotomikan, sehingga antara teoritis dan praktisi berada di ruang yang berbeda. Oleh karena itulah, riset kritis bermaksud untuk menjembatani dua dunia yang dipisahkan tersebut. Bahwa antara teori dan praktik tidaklah harus dipisahkan. Bahwa antara peneliti dan pelaku tindakan tidak harus dibedakan.

Penelitian tindakan, berakar pada tradisi kritis, memberikan jawaban terhadap kesenjangan antara teori dan praktik tersebut.

Hakekat PTS dan Posisi Manajerial Kepala Sekolah

Sebagaimana namanya penelitian tindakan awalnya lebih banyak dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Mula-mula, masing-masing elemen organisasi didiagnosis, apakah yang menjadi faktor pengganjal sehingga organisasi secara keseluruhan tidak produktif sebagaimana yang dikehendaki. Sebelum diagnosis, tentu terlebih dahulu seorang praktisi menyadari benar bahwa di dalam organisasi tersebut memang ada masalah yang harus dipecahkan. Kesadaran atas adanya masalah, bisa disebabkan oleh *sensitivical* praktisi atas gejala-gejala yang ia lihat pada indikator-indikator kinerja organisasi. Berdasarkan masalah yang ia identifikasi, praktisi lazimnya merumuskan alternatif-alternatif tindakan yang dapat diambil guna memecahkan masalah-masalah organisasi tersebut.

Setelah alternatif tindakan dirumuskan, kemudian praktisi mencoba mengimplementasikan alternatif tindakan yang dirumuskan. Hasil implementasi tersebut kemudian diamati dan dinilai, guna mengetahui pengaruh tindakan baru tersebut terhadap kinerja organisasi. Berdasarkan hasil penilaian, praktisi dapat melakukan refleksi, apakah kiranya tindakan lanjutan yang diperlukan agar kinerja organisasi makin meningkat lagi. Hasil refleksi pasca intervensi dan penilaian inilah, yang kemudian dijadikan sebagai *start* untuk siklus selanjutnya.

Kini, penelitian tindakan dapat dilakukan oleh kepala sekolah, karena ia merupakan manajer di tingkat satuan pendidikan sekolah. Sungguhpun baru diluncurkan mulai tahun 2007 oleh Direktorat Tenaga Kependidikan (Dit Tendik), Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen Mutendik) Depdiknas, penelitian tindakan sekolah (PTS), telah populer di kalangan tenaga kependidikan, terutama pengawas sekolah. Sebagai pembimbing dan pendamping yang dipercaya oleh Dit Tendik Ditjen Mutendik Depdiknas untuk pelaksanaan PTS para pengawas di sekolah, penulis sangat mendapatkan kesan bahwa prinsip-prinsip dan prosedur PTS sebenarnya diambil dari PT.

Yang membedakan adalah, bahwa yang melakukan PTS adalah kepala sekolah dan pengawas sekolah. Aksentuasi PTS yang dilakukan oleh kepala sekolah adalah pada peningkatan kinerja mengajar guru di mana kepala berada. Aksentuasi pada aspek supervisi akademik atau pembelajaran, lebih difokuskan pada peningkatan kemampuan guru dalam membelajarkan siswanya. Mengingat kemampuan guru dalam membelajarkan siswa ini demikian luas domainnya, maka PTS yang dilakukan oleh kepala sekolah bisa difokuskan pada kemampuan guru dalam menggunakan media, kemampuan guru dalam menggunakan metode, kemampuan guru dalam menyusun mengembangkan silabus, kemampuan guru dalam menyusun RPP, kemampuan guru dalam menerapkan model pembelajaran tertentu, dan masih banyak lagi.

Substansi PTS Kepala Sekolah

Di era 80-an, Robert J. Alfonso, seorang *expert* supervisi pembelajaran behavioristik, pernah mengedepankan pendapatnya setelah melakukan riset berulang tentang supervisi pembelajaran. Perilaku belajar siswa (*learning behavior*), banyak ditentukan oleh perilaku mengajar gurunya (*teaching behavior*). Sementara perilaku mengajar guru, banyak ditentukan oleh perilaku supervisi supervisornya (*supervision behavior*), dalam hal ini antara lain adalah kepala sekolah. Oleh karena itu Alfonso merekomendasikan, agar perilaku belajar siswa dapat diperbaiki, maka yang harus diperbaiki terlebih dahulu adalah perilaku supervisi kepala sekolahnya. Alfonso memodelkan teorinya sebagaimana pada diagram 1.

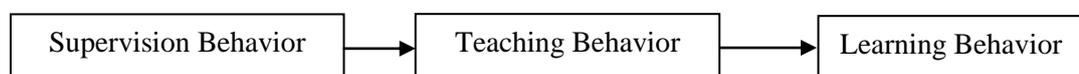


Diagram 1. Perilaku Supervisi, Perilaku Pembelajaran dan Perilaku Belajar

Temuan riset dan rekomendasi yang pernah dikedepankan oleh Alfonso tersebut, tampaknya sangat relevan jika ditarik dalam realitas pendidikan di sekolah era sekarang ini. Kemampuan kepala sekolah dalam melakukan supervisi ternyata tidak hanya memberikan kontribusi pada makin baiknya perilaku belajar siswa, melainkan juga memberikan kontribusi pada aspek strategis lainnya: perilaku riset tindakan kelas oleh guru, perilaku konselor sekolah dalam memberikan *advice* kepada kliennya, perilaku pustakawan sekolah dalam memberikan *service* kepada pelanggannya, perilaku laboran dan teknisi sumber belajar dalam mendukung praksis pembelajaran, dan perilaku staf administratif dalam memberikan layanan kepada siswa. Pada hal, seluruh perilaku tenaga kependidikan (kepala sekolah, guru, konselor, pustakwan, laboran dan teknisi sumber belajar) akan mengerucut pada perilaku belajar siswa (Diagram 2).

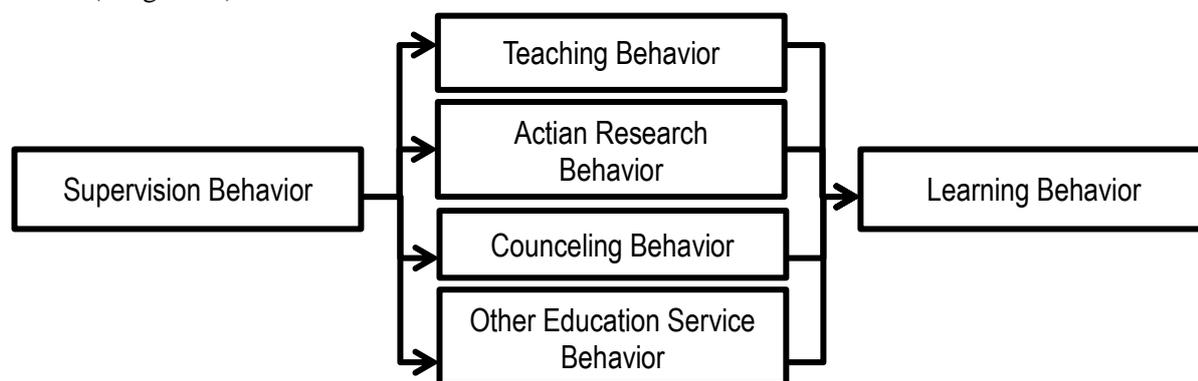


Diagram 2. Pengaruh Perilaku Supervisi Kepala Sekolah terhadap Perilaku Pelayanan Pendidikan dan Perilaku Pembelajaran

PTS yang Berfokus pada Kurikulum dan Pembelajaran

Sesuai dengan bidang kerja kekepalasekolahan, seorang kepala sekolah bertanggung-jawab terhadap kualitas proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang di sekolah yang dipimpinnya. Kualitas pembelajaran guru niscaya akan dapat ditingkatkan, ketika guru tersebut berkompeten dalam menjabarkan kurikulum (dalam hal ini adalah KTSP atau kurikulum-13) ke dalam perangkat-perangkat kurikulum: silabus, RPP, KKM, rencana evaluasi), melaksanakan implementasi pembelajaran, dan melaksanakan pengelolaan kelas.

KTSP dan kurikulum-13 adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. KTSP dan kurikulum-13 dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Penyusunan KTSP dan kurikulum-13 berpedoman pada standar isi dan standar kompetensi lulusan serta panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP).

Menurut BSNP Depdiknas (2006) dan Mulyasa (2006), penyusunan KTSP merupakan bagian dari kegiatan perencanaan sekolah/madrasah. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah (1) melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan setempat, (2) melakukan analisis konteks, (3) penyiapan dan penyusunan draf, (4) *review* dan revisi draf, (5) finalisasi draf, dan (6) pemberlakuan KTSP.

Koordinasi perlu dilakukan oleh kepala sekolah dalam merencanakan dan menyusun KTSP dan kurikulum-13. Kegiatan koordinasi sekurang-kurangnya menyangkut dua kegiatan sebagai berikut: (1) melakukan koordinasi mengenai rencana penyusunan KTSP dan kurikulum-13 dengan dinas

pendidikan kabupaten/kota setempat, dan (b) menghubungi ahli pendidikan setempat untuk diminta bantuannya sebagai nara sumber dalam kegiatan penyusunan KTSP dan kurikulum-13 .

Analisis konteks merupakan kegiatan yang mengawali penyusunan KTSP dan kurikulum-13. Kegiatan ini dapat dilakukan dalam rapat kerja atau lokakarya yang diikuti oleh tim penyusun KTSP dan kurikulum-13. Kegiatan menganalisis konteks mencakup dua hal pokok, yaitu: (1) analisis potensi dan kekuatan/kelemahan yang ada di sekolah (peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, biaya, dan program-program yang ada di sekolah), (2) analisis peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar (komite sekolah, dewan pendidikan, dinas pendidikan, asosiasi profesi, dunia industri dan dunia kerja, sumber daya alam dan sosial budaya), dan (3) mengidentifikasi standar isi dan standar kompetensi lulusan sebagai acuan dalam penyusunan KTSP dan kurikulum-13.

Setelah tim penyusun KTSP dan kurikulum-13 memahami potensi dan kekuatan/kelemahan sekolahnya, serta peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan lingkungannya, tibalah saatnya tim mulai bekerja menyiapkan dan menyusun *draft* KTSP dan kurikulum-13. Kegiatan ini dapat juga dilakukan dalam suatu rapat kerja atau lokakarya yang dihadiri oleh seluruh anggota tim penyusun KTSP dan kurikulum-13.

Tahapan-tahapan dalam manajemen mutu KTSP, dimulai dari perumusan perangkat KTSP dengan melibatkan *stakeholders sekolah*, yang terdiri atas: (1) pengembangan silabus, (2) penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, dan (3) penyusunan perangkat evaluasi berbasis kelas. Adapun *stakeholders* sekolah yang dilibatkan dalam perumusan perangkat KTSP adalah: kepala sekolah (ketua merangkap anggota), guru (anggota), konselor sekolah (anggota), komite sekolah (anggota), ahli pendidikan (nara sumber), dinas pendidikan (koordinasi dan supervisi). Dalam KTSP tersebut juga dirumuskan kriteria ketuntatasan minimal (KKM) yang harus dicapai oleh peserta didik pada masing-masing mata pelajaran dan kelas. Pengontrolan atas mutu KTSP yang dirumuskan oleh sekolah beserta dengan *stakeholdersnya* dilakukan dengan membandingkan dengan kisi-kisi evaluasi KTSP baik dari segi rumusannya, pihak-pihak yang terlibat dan dari segi substansinya.

Kegiatan pembelajaran adalah sebagai kelanjutan dari penjabaran kurikulum. Jika penjabaran kurikulum terkait dengan aspek rumusannya, maka kegiatan pembelajaran terkait dengan implementasi kurikulum di tingkat kelas. Dalam perspektif KTSP, menurut BSNP Depdiknas (2006) dan Mulyasa (2006), kegiatan pembelajaran adalah suatu aktivitas yang mengupayakan agar siswa terkoneksi untuk belajar. Belajar sendiri merupakan kegiatan aktif siswa dalam membangun makna atau pemahaman. Guru memberikan dorongan kepada siswa untuk menggunakan otoritasnya dalam membangun gagasan. Tanggungjawab belajar ada pada diri siswa, tetapi guru bertanggungjawab untuk menciptakan situasi yang mendorong prakarsa, motivasi dan tanggungjawab siswa untuk belajar sepanjang hayat.

Agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan efektif, ada sejumlah prinsip yang menurut perspektif KTSP harus dipedomani. Prinsip tersebut diangkat dari berbagai perspektif psikologi (behavioristik, kognitif, humanistik dan gestal), yaitu: (1) berpusat pada siswa, ialah bahwa kegiatan pembelajaran hendaknya mengkondisikan agar siswa belajar sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dan potensinya, (2) belajar dengan melakukan, ialah memberikan pengalaman nyata sehari-hari, terkait penerapan konsep, kaidah dan prinsip disiplin ilmu yang dipelajari, (3) mengembangkan kemampuan sosial, ialah memberikan kesempatan kepada siswa mengkomunikasikan gagasannya kepada siswa lain dan guru, (4) mengembangkan keingintahuan, imajinasi dan fitrah bertuhan, sebagai model dasar untuk bersikap peka, kritis, mandiri dan kreatif serta bertakwa kepada Tuhan, (5) mengembangkan ketrampilan pemecahan masalah, karena keberhasilan hidup banyak ditentukan oleh kemampuan untuk memecahkan masalah, (6) mengembangkan kreativitas siswa, dengan cara memberi kesempatan dan kebebasan kepada siswa untuk berkarya secara bersinambung, (7) membangun kemampuan menggunakan ilmu dan teknologi, dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk memperoleh

informasi dari berbagai media, (8) menumbuh-kembangkan kesadaran sebagai warga negara yang baik, (9) belajar sepanjang hayat, ialah bahwa pembelajaran perlu mendorong siswa untuk melihat dirinya secara positif, mengenali diri sendiri, percaya diri, memahami diri sendiri dan orang lain serta mendorong dirinya sendiri untuk terus belajar sepanjang hayat, dan (10) adanya perpaduan antara kompetisi, kerja sama dan solidaritas.

Sementara itu, kegiatan manajemen kelas adalah pengaturan terhadap fisik dan psikologis kelas agar terorkestrasi sehingga menjadi sebuah panggung yang menarik siswa untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Mengingat kelas yang kondusif adalah prasyarat bagi pembelajaran yang kondusif, maka manajemen mutu kelas juga menjadi prasyarat mutu pembelajaran. Ruang kelas harus diorkestrasikan sehingga memungkinkan aksesibilitas (siswa mudah menjangkau alat dan sumber belajar), interaksi (hubungan timbal balik siswa-siswa dan siswa-guru), dan variasi kerja siswa (bekerja perorangan, berpasangan dan kelompok).

DePorter (2002) melalui *Quantum Teaching* mengedepankan perlunya mengorkestrasi kelas dengan label lingkungan yang mendukung. Kelas yang baik menurutnya didukung dengan poster ikon, poter afirmasi, warna yang disukai dan menggairahkan, serta alat bantu belajar. Guna menguji bermutu tidaknya suatu kelas, seorang kepala sekolah dapat membunyikan bel tanda istirahat sebelum pembelajaran selesai. Ketika siswa cepat berhamburan keluar dari ruangan kelas dan merespon dengan teriak "hore", maka kelas tersebut dipandang tidak begitu bermutu. Sebaliknya, jika siswa merespon dengan ungkapan "hoo..." dan mereka tidak mau keluar dari kelasnya, maka itu adalah indikator kelas yang bermutu. Dengan perkataan lain, kelas yang bermutu adalah menarik secara fisik dan secara psikologis. Baik kemenarikan secara fisik maupun psikologis, sengaja didisain oleh manajer sekolah dan diimplementasikan serta diperbaiki secara berulang.

Keseluruhan proses-proses di bidang akademik, mulai dari penjabaran kurikulum, implementasi pembelajaran, dan pengelolaan kelas hendaknya mendapatkan pengawalan dan pembinaan dari pengawas. Keseluruhan proses-proses di bidang akademik tersebut, dapat menjadi substansi PTS. Oleh karena itu, sebagaimana yang pernah ditulis oleh Imron (2008), substansi PTS tersebut adalah:

- a. Di bidang kurikulum.
 1. Membantu guru dalam mencermati kurikulum.
 2. Membantu guru dalam melakukan workshop kurikulum.
 3. Membantu guru dalam menyusun silabus.
 4. Membantu guru dalam menyusun KKM.
- b. Di bidang pembelajaran:
 1. Membantu guru dalam menyusun RPP.
 2. Membantu guru dalam implementasi pembelajaran.
 3. Membantu guru dalam menerapkan berbagai model pembelajaran.
 4. Membantu guru dalam menerapkan berbagai metode pembelajaran.
 5. Membantu guru dalam menerapkan berbagai media pembelajaran.
 6. Membantu guru dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai sumber belajar.
 7. membantu guru dalam meningkatkan ketrampilan pembelajaran.
 8. Membantu guru dalam mengidentifikasi dan menerapkan evaluasi berbasis kelas.
- c. Di bidang pengelolaan kelas:
 1. Membantu guru mengorkestrasi ruang kelas untuk pembelajaran.
 2. Membantu guru mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah individual
 3. pengelolaan kelas.
 4. Membantu guru mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah kelompok
 5. pengelolaan kelas.

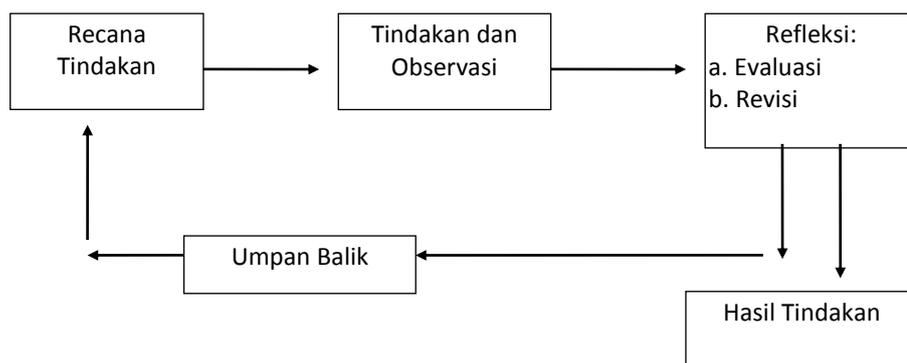
6. Membantu guru meningkatkan kohesivitas kelas.
7. membantu guru-guru menerapkan berbagai pendekatan pengelolaan kelas.
8. Membantu guru-guru menciptakan iklim kelas yang kondusif.

Langkah-Langkah PTS

Penelitian tindakan sekolah (PTS) sebenarnya mengadopsi prinsip-prinsip yang terdapat pada penelitian tindakan atau *action research*. Yaitu suatu riset yang tidak saja bermaksud mengidentifikasi sejumlah masalah pada berbagai macam kegiatan, melainkan sekaligus merumuskan alternatif pemecahan, menerapkan alternatif pemecahan yang sudah dirumuskan sebagai suatu tindakan, melakukan evaluasi terhadap tindakan dan memberikan umpan balik guna merumuskan tindakan berikutnya. Kegiatan merumuskan alternatif tindakan, melakukan tindakan, evaluasi tindakan dan umpan balik dilakukan secara berulang dalam beberapa siklus.

Hopkins (1993) dan Mc Taggart (1993) menyusun bagan yang dapat memperjelas prosedur penelitian tindakan sebagaimana pada Diagram 3. Hopkins (1993) dan Mc Taggart (1993) menyusun bagan yang dapat memperjelas prosedur penelitian tindakan sebagaimana pada Diagram 5.1.

Diagram 5.1. Siklus Penelitian Tindakan



Langkah-langkah PTS versi yang lainnya lagi dimulai dengan perencanaan, dilanjutkan dengan pelaksanaan, dan dilanjutkan lagi dengan observasi dan diikuti dengan refleksi. Mengingat PTS sebaiknya dilakukan lebih dari satu siklus, maka kegiatan refleksi yang merupakan langkah akhir dalam siklus pertama tersebut dijadikan sebagai bahan untuk menyusun rencana tindakan pada siklus kedua. Demikian juga refleksi pada siklus kedua dijadikan sebagai bahan untuk menyusun rencana tindakan pada siklus ketiga.

PENUTUP

PTS oleh kepala sekolah adalah penelitian yang dirancang untuk memperbaiki mengajar guru melalui serangkaian bantuan atau pendampingan yang dilakukan oleh kepala sekolah selaku supervisor. PTS dikembangkan dari PT sebagaimana PTK. PTS baru diluncurkan oleh Direktorat Tendik Ditjen Mutendik Depdiknas pada Tahun 2007, dengan memberikan *block grand* kepada pengawas dan didampingi oleh ahli dari LPTK dan LPMP.

Sejumlah karakteristik PTS adalah: Berfokus pada perbaikan manajerial dan akademik, dilakukan oleh kepala sekolah sebagai pelaku manajerial dan supervisor akademik, adanya tindakan tertentu untuk melakukan perbaikan terhadap aspek-aspek pembelajar guru, bersifat praktis dan tidak teoritis, serta bersifat reflektif. Sementara itu, prinsip yang harus dipedomani adalah: *probleme emergence, problema oriented, multi-ways, continues repeatedly, therapeutics evaluation, dan collaborative*.

Mengingat PTS terkait dengan TUPOKSI kepala sekolah baik sebagai manajer maupun sebagai supervisor, maka sepatutnya terus menerus dilakukan oleh kepala sekolah. Sebagai manajer, kepala

sekolah akan terus memberdayakan sumber daya terutama guru dalam melaksanakan pembelajaran yang berkualitas. Sebagai supervisor, kepala sekolah terus menerus dapat melakukan supervisi pembelajaran, untuk meningkatkan kualitas kinerja guru dalam pembelajaran. Kedua fungsi ini akan akan sistematis jika dilakukan oleh kepala sekolah dengan melakukan PTS. Oleh karena itu, sepatutnya Kemendikdasmen dan Dinas Pendidikan, mewajibkan kepala sekolah untuk melakukan PTS.

DAFTAR RUJUKAN

- Akbar, Sa'dun. 2007. *Pemilihan dan Perumusan Masalah Serta Perumusan Tujuan PTK. Makalah Pelatihan PTK di Lemlit UM tahun 2007*. Malang: Lemlit UM. Depdiknas, 2006. *Renstra Depdiknas Tahun 2006 s.d 2010*. Jakarta: Depdiknas.
- Burton, W.H. dan L. J. Bruecknwr, 1955. *Supervision: A Social Process*. New York: Apleten Century-Crofts, Inc.
- Chester, W. Harris, 1959. *Encyclopedia of Educational Reserch*. New York: McGraw Hill Book Company.
- De Roche, Edward F., 1985. *How School Administrators Solve Problems*. New Jersey: Englewood Cliffs, Prentice Inc.
- Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. 2004. *Penyusunan Usulan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research) untuk Tahun Anggaran 2004*. Jakarta: Detjen Dikti Depdiknas. Dittendik, Ditjen Mutendik Depdiknas. 2008.
- Petunjuk Pelaksanaan PTS. Jakarta: Dittendik, Ditjen Mutendik Depdiknas.
- Eisner, Elliot W., 1982. *An Artistic Approach to Supervision*. Dalam Thomas J. Sergiovanni, 1982. *Supervision of Teaching*. Washington: ASCD.
- Garman, Nooren B., 1982. *The Clinical Approach to Supervision*. Dalam Thomas J. Sergiovanni, 1982. *Supervision of Teaching*. Washington: ASCD.
- Hopkins, David. 1992. *A Teacher's Guide to Classroom Research*. Second Edition. Philadephia: Open University Press.
- Glickman, C.D. 1981. *Developmental Supervision*. Alexandria: ASCD.
- Gwynn, J. Minor, 1961. *Theory and Practice of Supervision*. New York: Dood Mead Company.
- Imron, Ali. 2008. Penelitian tindakan sekolah bagi pengawas dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. *Jurnal Tenaga Kependidikan* Edisi Nomor 2 tahun 2008. Jakarta: Direktorat Tendik, Ditjen Mutendik, Depdiknas.
- Imron, Ali, 1994. *Supervisi pembelajaran di Indonesia: Dari Kawasan Konseptual Sampai Kawasan Substantif*. Malang: Jurusan AP FIP IKIP Malang.
- Imron, Ali. 1994. *Pembinaan Guru di Indonesia: dari Kawasan Konseptual Sampai Kawasan Substantif*. Malang: Jurusan AP FIP IKIP Malang.
- Jacobson, Paul B. et al., 1954. *Effective School Principal In Elementary and Scondary School*. New York: Prentice-Hall, In Englewood Cliff, 1954.
- Johnston, M. 1997. *Action Research in a School University Partnership*. Chicago: AERA.
- John, Elliot. 1991. *Action Research for Educational Change*. Philadelphia : Open University Press.
- Handoko, T. Hani, 1987. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Liberty.
- Leo Idra Ardiana dan Kisyani-Laksono. 2004. *Bahan Pelatihan Penelitian tindakan kelas Terintegrasi untuk Guru SMP*. Jakarta: Ditjen Dikdasmen, Depdiknas. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Pengawas Sekolah/Madrasah.
- Lestari, T. 2008. *Perencanaan dan Pelaksanaan Penelitian Tindakan Sekolah*. Bahan Diklat. Jakarta: Dittendik, Ditjen Mutendik Depdiknas. Jakarta: Dittendik, Ditjen Mutendik Depdiknas.
- Nawawi, Hadari, 1983. *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: CV Gunung Agung.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Pengawas Sekolah/Madrasah.
- Saryono, 2006. *Abad Pengetahuan*. Makalah Seminar Pendidikan. Surabaya: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jatim.
- Setyadin, Bambang. 2007. *Aktualisasi Kegiatan Peneltian Tindakan Kelas*. Makalah Workshop PTK Guru SD, SMP, SMA/SMK dan Madrasah se Karedenan Bojonegoro, 14 Juli 2007. Malang: LP2S.

- Lestari, T. dan Budiyo, A. 2008. *Merencanakan dan Melaksanakan Penelitian Tindakan Sekolah*. Bahan Diklat. Jakarta: Dittendik, Ditjen Mutendik Depdiknas. Jakarta: Dittendik, Ditjen Mutendik Depdiknas.
- Semiawan, Conny, 1985. *Bagaimana Cara Membina Guru yang Profesional*. Jakarta: Depdikbud.
- Suhardjono, 2008. *Laporan Penelitian Tindakan Sekolah sebagai Karya Tulis Ilmiah dalam kegiatan pengembangan profesi Pengawas Sekolah*. Bahan Diklat. Jakarta: Dittendik, Ditjen Mutendik Depdiknas. Jakarta: Dittendik, Ditjen Mutendik Depdiknas.
- Sudjana, N. 2008. *Profil Kompetensi Pengawas Satuan Pendidikan*. Bahan Pelatihan. Jakarta: Dittendik, Ditjen Mutendik Depdiknas.
- Suyanto. 1997. *Pedoman Pelaksanaan Penelitian Tindakan Kelas (PTK)*. Jakarta: BP3SD, Dirjen Dikti, Depdikbud.
- Tahalele, J.F., 1979. *Kepemimpinan Pendidikan*. Malang: P3T IKIP Malang.
- Thomas, Mergendoller, dan Michaelson. 1999. *Project-Based Learning: A Handbook for Middle and High School Teachers*. New York: Macmillan.
- Tim Pelatih Proyek PGSM. 1999. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Unesco, 1981. *APPEID Report*. Bangkok: Unesco, 1981.
- Wikipedia The Free Encyclopedia. 2007. www.wikipedia.com (Diakses tanggal 5 Mei 2007).
- Wiles, Kimball, 1955. *Supervision for Better School*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.